



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN**

Jl. Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang
Telepon 08119920254 Whatsapp 08190222210

Laman: banten.kemenkumham.go.id, surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id

Nomor : W.12.PR.03 – 01

5 Januari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Banten

Yth. Kepala Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal
Kementerian Hukum dan HAM RI
di tempat

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

Demikian atas perkenannya, kami ucapkan terimakasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dodot Adikoeswanto

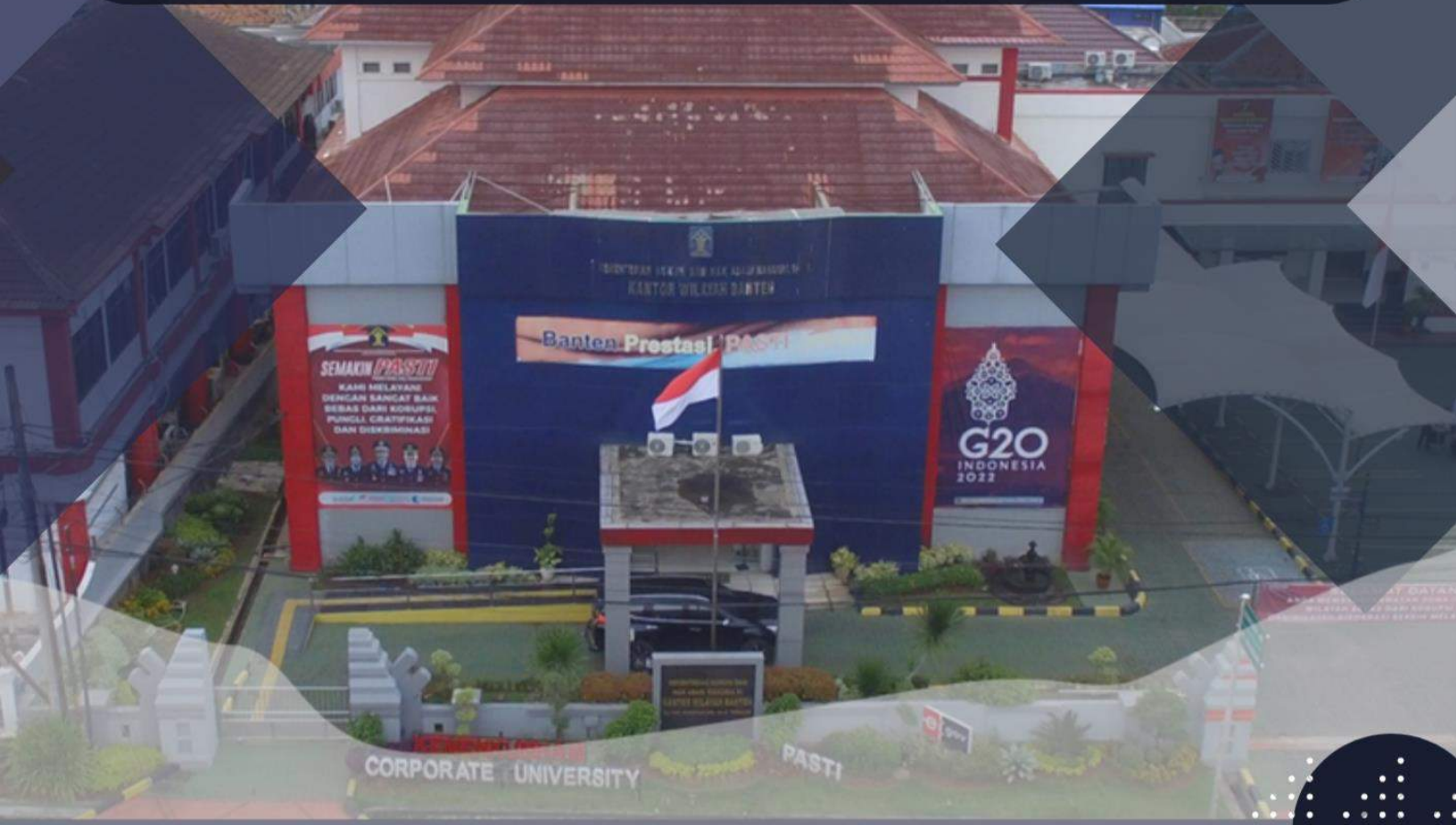
NIP 197110211994031001

Tembusan :

1. Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BANTEN



LKJIP 2023

*Laporan Kinerja instansi Pemerintah
Tahun 2023*

☎ 081 199 202 54

🌐 banten.kemenkumham.go.id

✉ kanwil.banten@kemenkumham.go.id

📍 Jl. Brigjen KH. Sam'un No. 44 Serang



KATA PENGANTAR



Semangat reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten tentunya tidak begitu sederhana, dibutuhkan manajemen perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan perbaikan secara terus-menerus guna mempercepat keberhasilan capaian kinerja.

Analisis, evaluasi dan tindaklanjut secara intens atas pelaksanaan kinerja menjadi fokus utama guna mencapai Akuntabilitas Kinerja yang berkualitas di Lingkungan Kantor Wilayah Banten yang kemudian direpresentasikan kedalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Banten.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kinerja, tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai berdasarkan hasil analisis atas pengukuran kinerja.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengacu kepada pengukuran hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2023 yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Hasil terhadap capaian kinerja tersebut, diharapkan mampu memenuhi harapan dan bermanfaat bagi semua pihak serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dimasa mendatang.

Serang, 31 Desember 2023
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dodot Adikoeswanto
NIP 197110211994031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	2
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
Maksud dan Tujuan	8
Aspek Strategis	8
Isu Strategis	9
Sistematika Penyajian Laporan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
Rencana Strategis	12
Sasaran Strategis	15
Perjanjian Kinerja	17
Program dan Anggaran	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
Capaian Kinerja Organisasi	24
Kantor Wilayah Banten	24
Divisi Administrasi	31
Divisi Yankum - Administrasi Hukum Umum	34
Divisi Yankum - Kekayaan Intelektual	38
Divisi Yankum - Peraturan Perundang-undangan	47
Divisi Yankum - Badan Pembinaan Hukum Nasional	51
Divisi Yankum - Hak Asasi Manusia	62
Divisi Yankum - Balitbang Hukum dan HAM	69
Divisi Keimigrasian	73
Divisi Pemasyarakatan	77
Realisasi Anggaran	136
Kinerja Anggaran	138
Capaian Kinerja Lainnya	139
BAB IV PENUTUP	144
Kesimpulan	145
Saran Dan Rencana Tindak Lanjut	146

LAMPIRAN

EXECUTIVE SUMMARY

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai instansi vertikal Kantor Wilayah Banten mengemban tugas dibidang hukum dan HAM dengan membangun hukum sebagai panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian, untuk mendukung terwujudnya visi, dan pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.



Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tiga Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Misi Nomor 6, Nomor 7 dan Nomor 8 yang kemudian diterjemahkan kedalam 7 Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasarakatan; dan
7. Melaksanakan tata laksana Pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

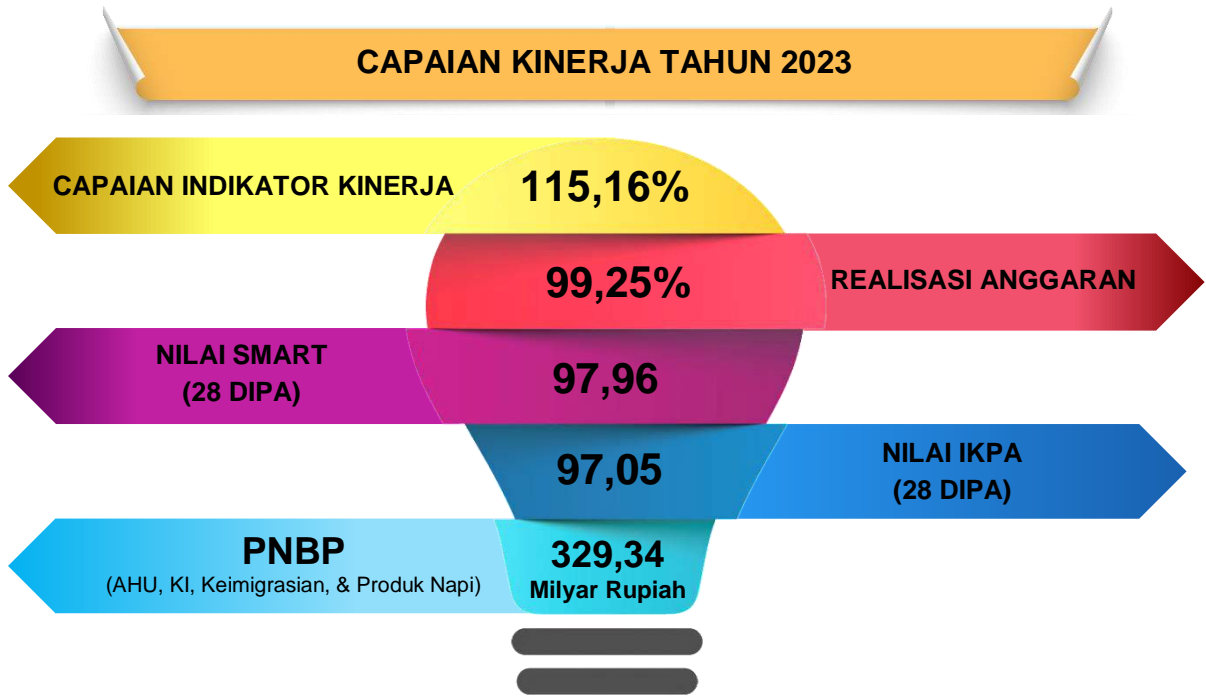
Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah Banten menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan.
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum.
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pamasarakatan.
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Selama periode Tahun 2023, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah Banten. Dari total 61 target indikator kinerja Kantor Wilayah Banten, sebanyak 59 indikator

KANWIL BANTEN "SEMAKIN BERPRESTASI PASTI JAWARA"

kinerja telah tercapai bahkan melebihi target tahun 2023 sedangkan 2 indikator kinerja masih belum tercapai secara optimal. Jika melihat rata-rata capaian seluruh indikator kinerja Kantor Wilayah Banten, maka hasil rata-rata capaian seluruh indikator kinerja telah tercapai dengan baik yaitu sebesar **115,16%** dengan realisasi anggaran sebesar **99,25%** dan nilai kinerja anggaran berdasarkan nilai SMART (bobot 60%) dan nilai IKPA (bobot 40%) sebesar **97,60**.



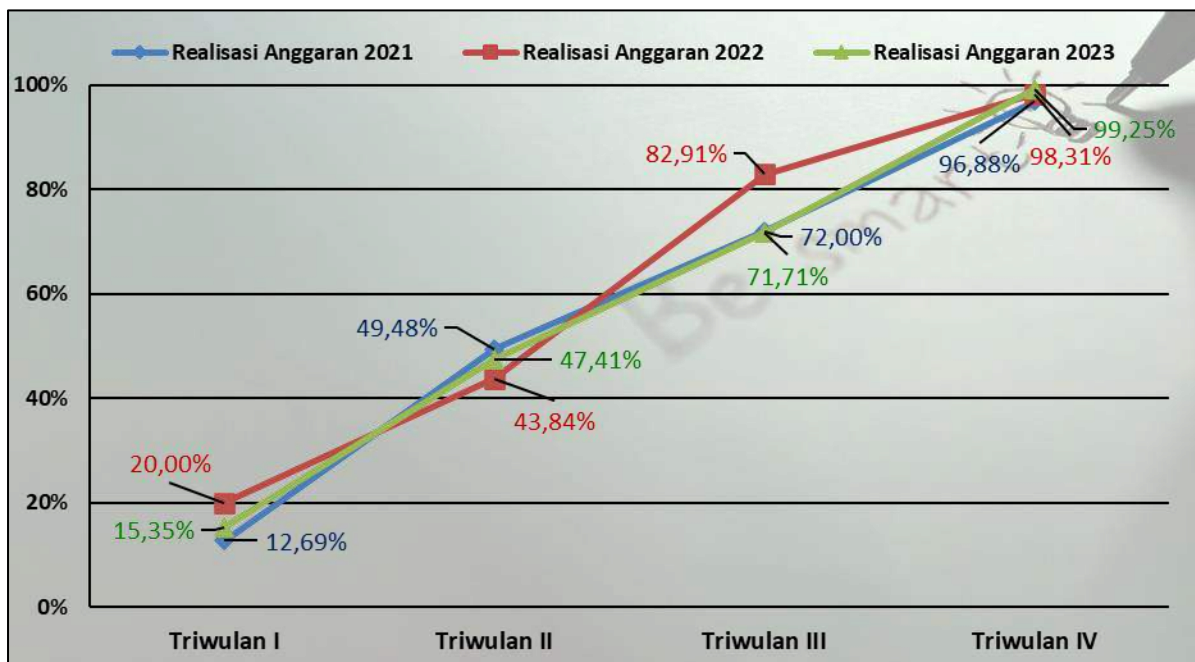
CAPAIAN KINERJA YEAR ON YEAR KANWIL BANTEN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (YoY)



Berdasarkan data capaian kinerja secara *year on year* (YoY), capaian indikator kinerja Kantor Wilayah Banten pada periode tahun 2023 mencapai 115,16% atau meningkat sebesar 4,67% dibanding capaian tahun 2022 yaitu sebesar 110,49%. Hal ini menunjukkan progress positif atas pencapaian indikator kinerja Kantor Wilayah Banten di tahun 2023.

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (YoY)



Kemudian pada sisi Anggaran, realisasi anggaran Kantor Wilayah Banten pada tahun 2023 mencapai 99,25% atau meningkat sebesar 0,94% dibandingkan periode tahun 2022 yaitu sebesar 98,31%. Peningkatan tersebut merupakan dampak positif atas pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran secara berkala guna percepatan dan akselerasi kinerja anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Banten.

Dalam rangka implementasi reformasi birokrasi, Kantor Wilayah Banten telah mewujudkan inovasi-inovasi yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik dengan berperan aktif melayani kebutuhan masyarakat dan adaptif mengembangkan kemudahan layanan publik. Inovasi yang dihasilkan tersebut merupakan prestasi bagi Kantor Wilayah Banten dalam mendukung pencapaian sasaran strategis terkait Reformasi Birokrasi pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut Inovasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten selama Tahun 2023, antara lain :

INOVASI TAHUN 2023

JAWARA New Version



TEROBOSAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

- ❖ Jawaara mengintegrasikan seluruh Pelayanan Hukum dan HAM yang dapat diakses kapan pun & dimanapun sehingga Masyarakat dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi & pelayanan Hukum dan HAM
- ❖ Manfaat Aplikasi JAWARA menutup celah Korupsi , Pungli , dan Gratifikasi

M-HUKDIS



TEROBOSAN PEMBINAAN HUKUMAN DISIPLIN

M-Hukdis pada Aplikasi Sikap Jawaara merupakan media digitalisasi pelaksanaan Pembinaan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten sehingga evaluasi dan monitoring proses pelaksanaan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilakukan secara optimal

APOA - JAWARA



TEROBOSAN PENGAWASAN ORANG ASING

Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA Jawaara) berbasis web yang dapat diakses melalui browser digunakan sebagai sistem pelaporan orang asing untuk pemilik hotel atau penginapan dan pemilik mess perusahaan guna melaporkan orang asing yang menginap sehingga memudahkan pihak Keimigrasian untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing

PEPITO



TEROBOSAN LAYANAN KONSULTASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Aplikasi Pesan Pintar Otomatis (PEPITO) Kekayaan Intelektual adalah sebuah aplikasi balas pesan otomatis bagi pengguna WhatsApp. Aplikasi akan membalas pesan secara otomatis ketika pengguna memilih menu atau perintah tertentu untuk mendapatkan informasi seputar Kekayaan Intelektual

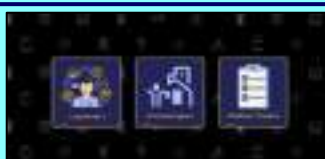
POSKO BANGKUMIS



TEROBOSAN LAYANAN PENYULUHAN HUKUM

Pos Konsultasi Bantuan Hukum Masyarakat Miskin/ tidak mampu merupakan program yang di inisiasi oleh Kantor Wilayah Banten bersama Pemerintah Daerah dan Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terdampak hukum sehingga akses terhadap keadilan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat

SIGUBOOK



TEROBOSAN PENCATATAN TAMU

- ❖ Mempermudah pengunjung dalam mengisi daftar tamu
- ❖ Mempermudah dalam pengumpulan dan penyortiran data pengunjung
- ❖ Membantu mengetahui jenis layanan yang sering dikunjungi

FACE SMART ACCESS LOCK



TEROBOSAN KEAMANAN AKSES PINTU MASUK

Kunci pintar otomatis berbasis sistem yang dapat merekam seseorang saat membuka atau mengunci pintu dengan deteksi wajah sehingga dapat meningkatkan keamanan dan berperan dalam monitoring disiplin pegawai serta sterilisasi ruangan dari pihak asing.

Keberhasilan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten pada tahun 2023 ini sejalan dengan prestasi-prestasi yang telah diraih di Lingkungan Kantor Wilayah Banten selama tahun 2023 diantaranya :

1. Penghargaan Anugerah Sahabat PWI Banten Tahun 2023



2. Penghargaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang atas Apresiasi Kerja Sama dan Dukungan Pelayanan Eazy Passport di KPKNL Tangerang I



3. Penghargaan Kanwil DJKN Provinsi Banten kepada Kanwil Banten atas Koordinator Wilayah dengan Tata Kelola Barang Milik Negara Terbaik Tahun 2022 di Provinsi Banten



4. Penghargaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang kepada Kanwil Banten sebagai Satuan Kerja dengan Penatausahaan BMN Terbaik Tahun 2022 di Wilayah Kerja KPKNL Serang



5. Penghargaan Ditjen Kekayaan Intelektual kepada Kanwil Banten sebagai Terbaik I pada Subkategori Kinerja Anggaran di Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2023



6. Penghargaan Ditjen Kekayaan Intelektual kepada Kanwil Banten sebagai Kantor Wilayah dengan Jumlah Pelaksanaan MIPC Terbanyak Tahun 2023



7. Penghargaan Ditjen HAM kepada Kanwil Banten sebagai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang mendorong 8 Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada tahun 2022



8. Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Banten kepada Kanwil Banten sebagai Badan Publik “Informatif”



9. Penghargaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten atas Partisipasi Aktif dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)



10. Penghargaan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) kepada Kanwil Banten sebagai Terbaik II Persentase Pertumbuhan, Pencapaian Target, dan Realisasi PNPB Tahun 2021 – 2023



11. Penghargaan It Works.id kepada Kanwil Banten sebagai TOP Digital Implementation 2023



12. Penghargaan Kanwil DJPB Provinsi Banten kepada Kanwil Banten sebagai Kategori Satker UAPPA-W Besar Penghargaan Atas Hasil Telaahan Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (UAPPA-W) Lingkup Kanwil DJPB Provinsi Banten Tahun 2022



13. Penghargaan Kanwil DJPB Provinsi Banten kepada Kanwil Banten sebagai Peringkat Kedua Satker dengan capaian IKPA tertinggi bulan Oktober 2023 Kategori Pagu Kecil <25M dengan nilai IKPA 100



14. Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM kepada Kanwil Banten atas Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023



15. Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Banten atas Partisipasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Instansi Vertikal di Provinsi Banten



Hasil pencapaian kinerja, inovasi dan prestasi yang telah diraih Kantor Wilayah Banten merupakan wujud nyata atas peran aktif Kantor Wilayah Banten dalam memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan layanan Hukum dan HAM di Wilayah Banten. Diharapkan hal ini dapat memberikan manfaat dan berdampak positif bagi Kementerian Hukum dan HAM RI serta masyarakat luas.

BAB 1

PENDAHULUAN

Menyajikan uraian singkat tentang latar belakang dan gambaran umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, aspek strategis dan isu strategis organisasi, serta sistematika penyusunan laporan kinerja.

PENGAYOMAN

LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Kementerian Hukum dan HAM menjalankan tugas dan fungsi di bidang HAM, bidang peraturan perundang-undangan, bidang pemasyarakatan, dan bidang keimigrasian.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran strategis sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka disusun Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten selama tahun 2023 dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

TUGAS, FUNGSI & STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyelenggarakan fungsi antara lain :

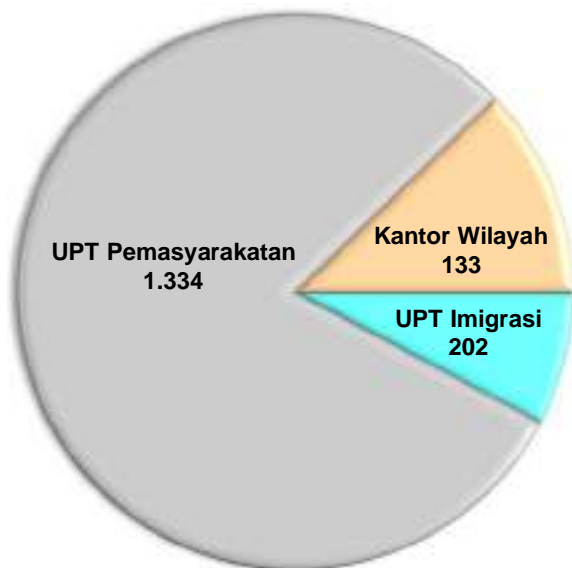
1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan.
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum.
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya

hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.

4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat.
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Wilayah Banten di dukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah pegawai pada seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Banten berjumlah 1.669 orang, dimana 133 orang diantaranya merupakan pegawai pada Kantor Wilayah Banten. Berikut data sebaran pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten :

PEGAWAI PADA SATUAN KERJA



PEGAWAI KANTOR WILAYAH BANTEN



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Divisi, yaitu :

1. Kepala Divisi Administrasi
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan
3. Kepala Divisi Keimigrasian
4. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap 19 (sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten diantaranya :

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda

3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Tangerang
5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tangerang
6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon
7. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang
8. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung
9. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Terbuka Ciangir
10. Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang
11. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang
12. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pandeglang
13. Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang
14. Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang
15. Balai Pemasyarakatan Kelas II Ciangir
16. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas I Serang
17. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang
18. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang
19. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon

Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten terdiri atas :

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- f. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan

- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

2. Divisi Pemasarakatan

Divisi Pemasarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit

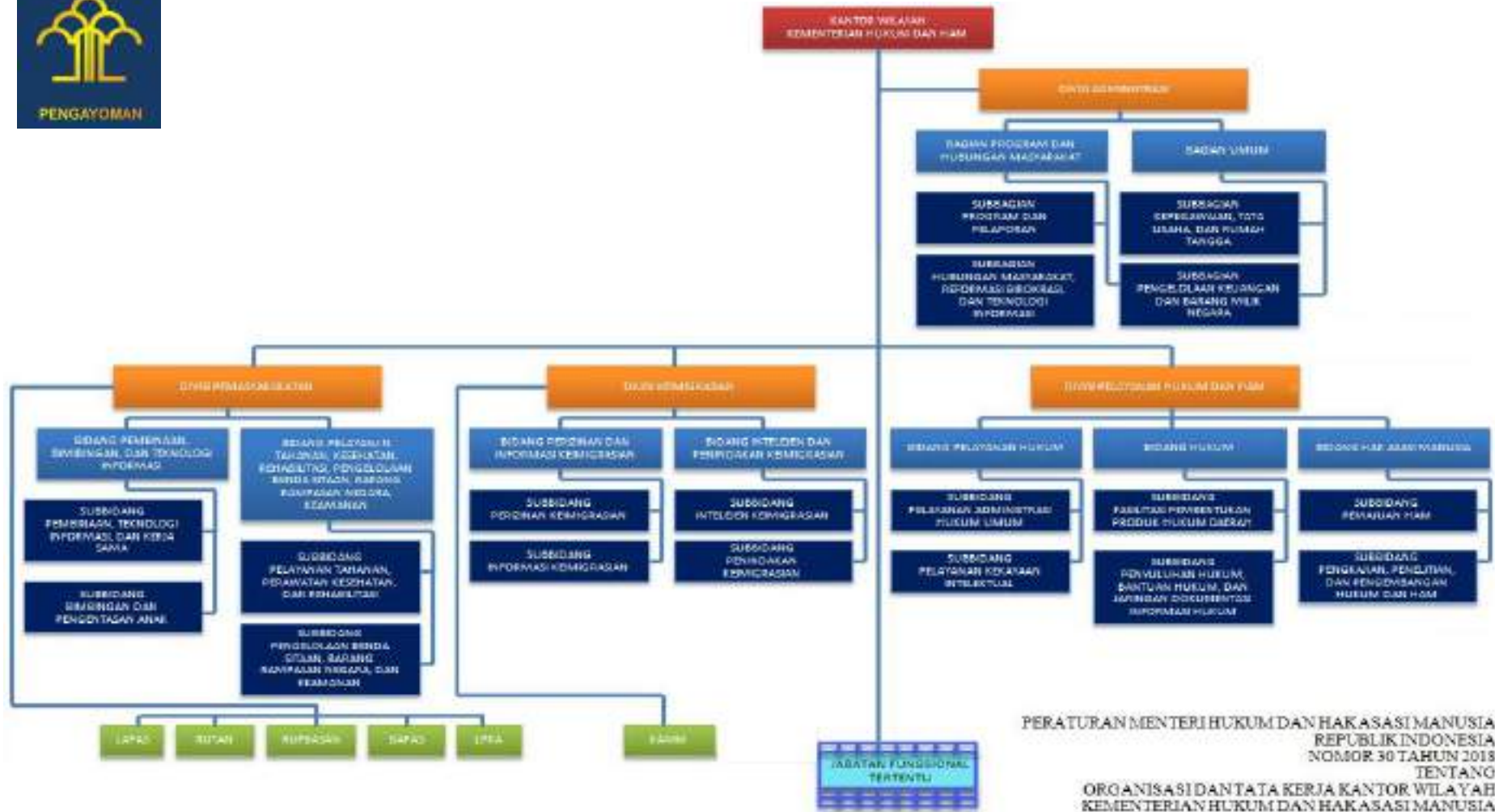
Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, dan pejabat fungsional tertentu;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN



MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran strategis Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi serta dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk penilaian dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan selama periode satu tahun sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kerja yang akan datang dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

ASPEK STRATEGIS

Sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Banten, Kantor Wilayah Banten berperan dalam menyediakan layanan Hukum dan HAM serta mengoptimalkan potensi keragaman dan kearifan lokal guna mendukung Visi dan Misi Presiden. Aspek strategis yang menjadi peran penting keberadaan Kantor Wilayah Banten dalam menyediakan pelayanan dan mengoptimalkan potensi di Wilayah Banten diantaranya :

